

Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo

Yusuf Hafandi¹⁾, Romandhon^{2)*}

^{1,2)} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo

^{2)*} romandhon@unsiq.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Wonosobo. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder. Sampel yang digunakan adalah seluruh laporan rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo yang meliputi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, masa selama 5 tahun atau 60 bulan periode tahun anggaran 2013 sampai tahun 2017. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,048. Variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,452. Variabel retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,844. Variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,018. Variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 46,8% dan sisanya 53,2% dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pendapatan Asli Daerah.

Abstract

The purpose of this study aims to determine the effect of regional taxes, the results of the management of the separated regional wealth, regional levies, and other valid regional income to the original regional income in Wonosobo Regency. This research method uses a quantitative approach with secondary data analysis. The sample used is the entire report of the Wonosobo Regency's Original Revenue Recapitulation which includes local taxes, the results of the management of separated regional assets, local levies and other valid regional income, a period of 5 years or 60 months for the 2013 to 2017 fiscal year period. Testing the hypothesis of this study using multiple linear regression test. Based on the results of the study showed that local tax variables affect the Original Revenue with a significant value smaller than 0.05 that is equal to 0.048. Variable results of the management of the separated regional wealth do not affect the Regional Original Revenue with a significant value greater than 0.05 which is equal to 0.452. Regional levies variable does not affect the Local Revenue with a significant value greater than 0.05 which is 0.844. Other variables of valid regional income affect the Original Local Revenue with a significant value smaller than 0.05 which is equal to 0.018. The independent variable affects the dependent variable by 46.8% and the remaining 53.2% is influenced by factors not examined in this study.

Keywords: Regional Tax, Results of Management of Separated Regional Wealth, Regional Retribution, Other Legitimate Local Revenues, Regional Original Revenues.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai sebuah penyelenggara urusan pemerintahan di sebuah negara berkewajiban menuangkan pemikiran dan usulan dalam mewujudkan tujuan dari negara, salah satunya dengan adanya pembangunan (Temaja dan Suputra, 2014). Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan pembangunan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih baik dan dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri (Widada, 2012 dalam Kurniawati *et al.* 2014). Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pasal 1 nomor 18 bahwa "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan". Beberapa komponen pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah akan memberikan kontribusi yang besar untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kabupaten Wonosobo memiliki banyak sumber PAD, diantaranya berasal dari retribusi terminal, retribusi parkir, retribusi wisata seperti Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng dan lain-lain, walaupun sumber-sumber PAD cukup banyak namun kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah masih kecil.

Tabel. 1 Kontribusi PAD Terhadap Penerimaan Daerah Tahun 2013 - 2017

No.	Tahun Anggaran	Jenis Penerimaan (Rp.000)		Sumbangan (%)
		Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	
1	2013	84.066.224.000	745.778.034.000	11,30
2	2014	126.737.232.802	812.486.954.944	15,60
3	2015	154.515.664.500	854.196.099.000	18,08
4	2016	177.947.569.560	1.223.065.453.000	14,54
5	2017	210.138.740.720	1.157.965.665.000	18,14
	Total	753.405.431.582	4.793.492.205.944	15,72

Sumber : DPPKAD Kabupaten Wonosobo Tahun 2013-2017

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo masih kecil kontribusinya terhadap penerimaan daerah dan PAD Kabupaten Wonosobo masih sangat tergantung kepada sumber dana dari pemerintah pusat, karena kemampuan dari sumber dana dari PAD hanya sekitar 15,72 persen. Hal ini terlihat di dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dimana sekitar dua pertiga dari APBD pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo dibiayai dari pemerintah pusat dan provinsi.

Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu (Sulistiyorini, 2004).

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim, 2008). Penerimaan ini antara lain dari BPD, perusahaan daerah, deviden BPR-BKK dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kendy *et al.* (2017) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2015.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Th. 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Hubungan antara PAD dengan retribusi daerah merupakan hubungan secara fungsional. Karena jika kontribusi retribusi daerah meningkat setiap tahunnya maka pembangunan di daerah akan terlaksana dengan baik serta untuk menunjang keperluan daerah (Kusuma dan Wirawati, 2013). Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas (lestari, 2016). Kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa, penerimaan dari bunga simpanan giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor (prabawa, 2009).

Kabupaten Wonosobo terletak di jantung Provinsi Jawa Tengah dan merupakan kabupaten yang memiliki potensi ekonomi, perikanan dan potensi wisata yang lengkap seperti, wisata alam, religi, budaya, kuliner, wisata buatan hingga wisata minat khusus, membuat julukan Kota Wonosobo menjadi kota wisata sangat populer dikalangan wisatawan. Tidak mengherankan jika Kabupaten Wonosobo termasuk urutan 3 (tiga) terbanyak yang dikunjungi wisatawan mancanegara(<https://jatenglive.com/tampil-berita/Menikmati-Indahnya-Wonosobo-Negeri-Sejuta-Pesona-dan-Budaya>). Hal tersebut tentu memberi peluang bagi Kabupaten Wonosobo untuk lebih meningkatkan upaya perolehan dan penggalian sumber pendapatan daerah, salah satunya berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah yang meliputi dari sektor pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah agar penerimaannya semakin meningkat seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa, usaha, dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo masih kecil kontribusinya terhadap penerimaan daerah dan PAD Kabupaten Wonosobo masih sangat tergantung kepada sumber dana dari pemerintah pusat.

2. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Menurut Wasito (2001) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) dalam Pratama (2016), Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan kepala tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Pratama, 2016).

Hipotesis 1 : Pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan yaitu bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan Bank, bagian laba lembaga keuangan non Bank, bagian laba atas penyertaan modal/investasi (Halim, 2004 dalam Nuzulistyan, 2017). Bahwa yang dimaksud dengan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Menurut Halim (2004) dalam Pratomo (2016) mengemukakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah hasil penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

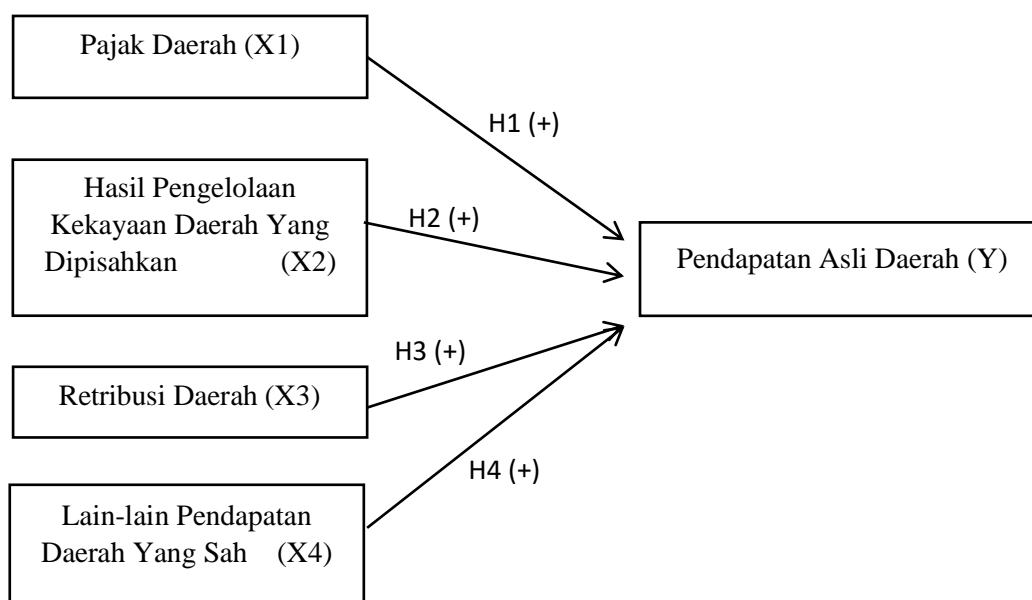
Hipotesis 2 : Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah

Retribusi secara umum adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan atau kelompok. Dalam konteks daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (siahaan, 2005 dalam Effendi, 2018).

Hipotesis 3 : Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan keuangan daerah yang diperoleh dari lain-lain milik pemerintah daerah (Halim dan Kusufi, 2014 dalam Agustin *et al.* 2018). Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa, bunga simpanan bank dan giro, serta penerimaan denda kontraktor. Namun demikian sumber pendapatan ini tergantung dari potensi daerah itu sendiri (Barmin, 2018).

Hipotesis 4 : Lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah



Gambar 1. Model Penelitian

3. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiono, 2012). Penelitian ini akan menganalisis data dengan mendeskriptifkan data dengan apa adanya yang ada di laporan rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo periode tahun 2013 sampai 2017.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan sensus sampling (sampel jenuh) yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (sugiyono, 2012). Sampel dalam penelitian ini adalah laporan rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonosobo yang meliputi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah periode tahun anggaran 2013 sampai 2017. Yang terdiri dari 5 tahun atau 60 bulan kalender dari awal Januari 2013 sampai Desember 2017.

Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan langkah menganalisis statistik deskriptif kemudian menguji ketepatan model (Uji F). Sebelum menganalisis hipotesis dilakukan uji kualitas data dengan mengukur validitas dan reliabilitas. Kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik berupa uji normalitas, multikolonieritas, dan heterokedastisitas. Terakhir uji determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui besar keterikatan atau keeratan variabel dependen.

4. HASIL dan PEMBAHASAN

Penelitian ini untuk membuktikan bahwa pengaruh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Wonosobo. Objek penelitian ini adalah laporan realisasi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun periode 2013 sampai tahun 2017. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 60 laporan bulanan.

Tabel 2. Deskriptif Variabel
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	60	3.11	43.12	16.2618	8.00606
PD	60	1.22	3.88	2.4782	.78765
HPKDYD	60	.35	2.56	1.0223	.63401
RD	60	.59	2.88	1.2355	.53038
LPDYS	60	3.59	20.88	11.5282	4.90129
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 2. diketahui bahwa terdapat lima variabel penelitian (Pendapatan asli daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) dan jumlah sampel secara keseluruhan sebanyak 60 sampel. Dengan nilai minimum sebagai nilai terendah, nilai maksimum sebagai nilai tertinggi, *mean* sebagai nilai rata-rata dan standar deviasi sebagai suatu indeks yang menggambarkan sebuah data terhadap rata-ratanya untuk setiap variabel dalam penelitian.

Pada uji *goodness of fit* dihasilkan F hitung lebih besar dari F tabel yaitu $32,526 > 14,859$ dengan tingkat signifikan di bawah 0,05 yaitu 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah, Retribusi daerah, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sudah sesuai atau *fit* sehingga secara bersama-sama dapat mempengaruhi Pendapatan asli daerah.

Uji Normalitas

Tabel 3. Analisis Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,36142992
Most Extreme Differences	Absolute	,075
	Positive	,075
	Negative	-,067

Test Statistic	,075
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019 (Lampiran)

Tabel 3. memperlihatkan bahwa hasil perhitungan normalitas dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* memiliki probabilitas tingkat signifikan di atas tingkat $\alpha = 0,05$ yaitu 0,200. Hal ini berarti dalam model regresi terdapat variabel residual yang terdistribusi secara normal.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Hasil Uji Run Test

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-1.29916
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	25
Z	-1.562
Asymp. Sig. (2-tailed)	.118

a. Median

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 (Lampiran)

Tabel 4. memperlihatkan bahwa hasil perhitungan autokorelasi dengan menggunakan uji *Run Test* memiliki probabilitas tingkat signifikan di atas tingkat $\alpha = 0,05$ yaitu 0,118. Hal ini berarti dalam model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

**Tabel 5. Pengujian Hipotesis
Pengujian Koefisien Determinasi**

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.710 ^a	.504	.468	5.83910	1.783

a. Predictors: (Constant), LPDYS, PD, RD, HPKDYD

b. Dependent Variable: PAD

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019 (Lampiran)

Tabel 5. menunjukkan bahwa koefisien determinasi nilai *adjusted r-square* (*adjusted R²*) sebesar 0,468. Hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel independen (pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini adalah sebesar 46,8% sedangkan sisanya 53,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Tabel 5. Uji Hipotesis

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.866	4.346		.199	.843
PD	2.194	1.085	.216	2.021	.048
HPKDYD	1.743	2.302	.138	.757	.452
RD	-.337	1.701	-.022	-.198	.844
LPDYS	.745	.305	.456	2.442	.018

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019 (Lampiran)

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dewi (2017), Prasetyo 2017 (2017), dan Kusuma dan Wirawati (2013) yang membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah merupakan andalan bagi daerah dan diharapkan dari penerimaan sumber tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pendapatan asli daerah (Effendi, 2018). Jika dilihat dari realisasi penerimaan selama tahun 2013 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan dan melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo. Hal ini terjadi karena diiringi dengan peningkatan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo untuk mengimbangi dana perimbangan dari pemerintah pusat di Kabupaten Wonosobo yang masih cukup tinggi.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dewi (2017) dan Laksmi (2017) yang membuktikan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabawa (2009) dan Nuzulistyan *et al.* (2017) yang membuktikan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini membuktikan bahwa penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang meningkat tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan karena masih minimnya perusahaan milik daerah atau swasta yang ada di Wonosobo. Hal ini tentu menjadi pemacu atau penyemangat bagi pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk terus berusaha mengoptimalkan penerimaan dari sektor perusahaan milik daerah atau swasta yang merupakan sumber penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan meningkatnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah untuk program-program pembangunan.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prasetyo (2017), Kusuma dan Wirawati (2013) dan Ishak *et al.* (2014) menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabawa (2009), dan Kendy *et al.* (2017) yang membuktikan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi daerah ini diperoleh dari pemungutan hasil dari jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo salah satunya yaitu retribusi pasar adalah subyek (jumlah pedagang), obyek (luas, los, dan dasaran terbuka), tarif serta kinerja pemungutan (efisiensi dan efektivitas pemungutan) retribusi pasar. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah pedagang, luas kios, dan dasaran terbuka serta jumlah petugas pemungut retribusi maka peranan penerimaan retribusi pasar akan semakin besar atau semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah maka penerimaan

daerah dari sektor retribusi pasar juga semakin meningkat. Namun penelitian ini membuktikan bahwa meningkatnya penerimaan retribusi pasar tidak memberi pengaruh terhadap retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan asli daerah yang terdiri dari dana hibah, dana darurat, dan dana denda retribusi (Kendy *et al.* 2017). Hasil pengujian keempat pada tabel 4.7 membuktikan bahwa lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Wahyu *et al.* (2017), Laksmi (2017) dan prabawa (2009) membuktikan bahwa variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun rendahnya penerimaan denda retribusi tersebut tidak sebanding dengan dengan perkembangan objek dan sarana wisata yang terus berkembang di Kabupaten

Wonosobo serta jumlah pengunjung yang terus meningkat. Hal ini tentunya menjadi tugas besar bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan denda retribusi sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang akan diiringi pula dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

5. PENUTUP

Pendapatan Asli Daerah agar bisa diperoleh secara maksimal harus melakukan pembenahan dalam hal peningkatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan memberikan ruang yang luas terhadap pendirian perusahaan milik daerah atau swasta yang ada di Wonosobo, retribusi daerah, dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu ruang lingkup penelitian hanya masih sebatas di Kabupaten Wonosobo. Hal ini menyebabkan hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, YL. Utomo, SW. dan Sulistyowati, NW. 2018. *Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun*. Jurnal Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi. Program Studi Pendidikan Akuntansi-FKIP, Universitas PGRI Madiun. Artikel diakses 23 September 2019.
- Asteria, B. 2015. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Jurnal Riset Manajemen 2(1):51-61. Prodi Manajemen, STIE Widya Wiwaha.
- Barmin, RY. 2018. *Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Riset (2018) 2(1) P-ISSN: 2614-5170 E-ISSN: 2615-1375. Fakultas Ekonomi, Universitas Gorontalo. Artikel diakses 23 September 2019.
- Batik, K. (2013). *Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah penduduk, penerimaan pembangunan, dan inflasi terhadap PAD di kab Lombok Barat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan 116-140 Vol 11 No 1.
- Dewi, K. 2017. *Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya)*. Artikel diakses 15 Oktober 2019.
- Effendi, DA. 2018. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2016*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
- Ferdianto, Yanuar.2010. *Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Fitriana. 2014. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Artikel diakses 10 Februari 2017.
- Funangi, U., Mollet, JA., dan Bisay, C.M. 2018. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua*. Jurnal

- Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cendrawasih Papua. Artikel diakses 12 September 2019.
- Ghazali, I. 2011. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23 (Ed. Ke-8)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gitaningtyas, YK., Dan Kurrohman, T. 2014. *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ). Artikel diakses 23 Februari 2019.
- Halim, A. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP-AMP Yogyakarta: YKPN.
- Halim, A. 2008. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIE YKPN.
- Hardiyanti V. 2012. *Analisis Pemungutan Pajak Hiburan dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya*. [Skripsi S1]. Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya.
- Indriani, E. 2018. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Peningkatan PAD Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2009-2016*. [Skripsi]. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Eknomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ishak, Y, Soegiarto, E. dan Hariyadi, RM. 2014. *Analisi Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Kusuma, Md.KAA. dan Wirawati Ni Gst. P. 2013. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD SeKabupaten/Kota Di Prov. Bali*. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.3:574-585. ISSN: 2302-8556. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana (UNUD), Bali, Indonesia.
- Laksmi, DN. 2016. *Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Realisasi PAD Tahun Anggaran 2006-2015 Kota Magelang*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Yogyakarta*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nuzulistyan, KR, Supriyanto, A, dan Paramita, PD. 2017. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Pada DPPAD Prov. Jawa Tengah Periode Tahun 2008-2015)*. [Skripsi]. Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pandanaran Semarang.
- Novalistia, RL. 2016. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2014)*. *Journal Of Accounting* 2(2). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pandanaran Semarang.
- Prabawa A. 2009. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas*. *Majalah Ilmiah Ekonomika* Volume 12 Nomor 3, Agustus 2009: 109-179. Artikel di akses 10 Oktober 2019.
- Prasetyo R. 2017. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magetan*. *Jurnal dan Riset Akuntansi* Volume 6, Nomor 3, Maret 2017 ISSN: 2460-0585. Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
- Pratama, YAL. 2016. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Bantul*. [Skripsi]. Program Studi Akuntansi, Fak. Ekonomi, Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Puteri, Mervina. 2015. *Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Periode 2010-2013)*. [Skripsi]. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas. Bandung.

- Putro, NS. 2010. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ramlan, Darwanis, dan Abdullah, S. 2016. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)*. Jurnal Magister Akuntansi pp: 79-88. ISSN 2302-0164. Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Sihotang, Y. 2018. *Kaitan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017*. Jurnal Riset Akuntansi, 1-25 Volume 7 Nomor 1.
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suharsimi, A. 2012. *Pengelolaan Kelas Dan Siswa*. CV. Rajawali. Jakarta. 8
- Temaja, I. D. G. Agung Dwi dan Suputra, I. D. G. Dharmas. 2014. *Pengaruh Retribusi Daerah Pelayanan Pasar, Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar*. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana 9(1): 209-220. ISSN 2302-8556. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Diunduh 12 Oktober 2019 dari http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973/UU_28_Tahun_2009_TtgPDRD.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*. 2004. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Diunduh dari http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 2004. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Diunduh dari <http://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/95>.
- Wasito. 2001. *Pendapatan Asli Daerah*. Universitas Gajah Mada Yogyakarta. <http://jurnal.ugm.ac.id>. <https://jatenglive.com/tampil-berita/Menikmati-Indahnya-Wonosobo-Negeri-Sejuta-Pesona-dan-Budaya> (14 Okt 2014, 12:06 WIB). Diunduh 20 Oktober 2019.